

ABSTRAK

Tuntutan untuk mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar setelah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam usahanya meningkatkan PAD, dengan begitu Pemerintah Provinsi Papua dapat meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan dari desentralisasi fiskal. Berdasarkan dari perspektif tersebut, maka penting bagi pemerintah Provinsi Papua untuk bisa melaksanakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dimana yang dilakukan bukan hanya menggali sumber-sumber penerimaan saja namun juga termasuk bagaimana mengatur pengeluarannya. Ketidakefektifan pengeluaran daerah dapat dipastikan akan menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah tidak optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis kemampuan keuangan daerah, 2) menganalisis kinerja keuangan daerah, dan 3) mengukur ketergantungan fiskal pemerintah daerah Provinsi Papua Tahun 2008 -2015. Alat analisis yang digunakan adalah: kemampuan keuangan pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ketergantungan fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) derajat otonomi fiskal (DOF) Provinsi Papua selama periode 2008 – 2015 adalah 6,25% atau masih sangat rendah. Total Pendapatan Daerah (TPD) Provinsi Papua masih didominasi oleh dana perimbangan dan dana lain-lain yang sah, berdasarkan nilai Indeks Kemampuan Rutin (IKR), kemampuan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam prospektif pembiayaan pengeluaran masih kurang; 2) Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua masih kurang, efektivitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Tahun 2008-2015, sebagian besar masuk kategori Efektif, kecuali tahun 2013, 3) Berdasarkan ketiga indikator di atas, maka ketergantungan fiskal pemerintah daerah Provinsi Papua terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi

Kata Kunci: otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, kinerja keuangan daerah, ketergantungan fiskal

ABSTRACT

The demand to develop the potential of regional income (PAD) increases after the delegation of authority from the center to the regions, including the Provincial Government of Papua. Local governments are expected to be more creative in their efforts to increase PAD, thus the Papua Provincial Government can increase accountability and flexibility in the empire in order to achieve the objectives of fiscal decentralization. Based on this, it is important for the government of Papua Province to be able to carry out the functions of regional financial management, which is done not only the source of acceptance only. The inefficiency of regional capacity can certainly lead to the implementation of regional development is not optimal.

The purpose of this research are: 1) the function of local financial capacity, 2) to analyze the performance of regional finance, and 3) the size depends on the local government of Papua Province in 2008-2015. The analytical tool used is: financial capacity of local government, local government financial performance, and fiscal dependency.

The results showed: 1) the degree of fiscal autonomy (DOF) of Papua Province during the period of 2008 - 2015 was 6.25% or still very low. Total Provincial Revenue (TPD) of Papua Province is still dominated by balancing funds and other funds which, according to the Routine Capacity Index (IKR), the capability of the Papua provincial government in prospective financing is low; 2) The level of financial independence of the provincial government of Papua is still low, the financial effectiveness of local governments of Papua Province in 2008-2015, most of them in the Effective category, except in 2013, 3) Based on the third indicator above, the provincial government of Papua against the central government is still high

Keywords: regional autonomy, financial performance, fiscal dependency